



Judul	: DPR Dilangkahi di PMN Kereta Cepat
Tanggal	: Selasa, 09 November 2021
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 3

DPR Dilangkahi di PMN Kereta Cepat

Badan Anggaran tidak pernah membahas pembangunan kereta cepat masuk belanja APBN.

M ILHAM RAMADHAN

ilham@mediaindonesia.com

PEMBAHASAN mengenai Penambahan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ternyata tidak menempuh mekanisme yang biasa dijalankan selama ini, yakni di komisi VI.

Keputusan pemberian PMN dilakukan tanpa pembahasan dengan parlemen.

Anggota Komisi XI DPR Fauzi H Amro mempertanyakan proses pengubahan skema pembangunan KCJB. Ia pun menyatakan pemerintah tak pernah membahas pembangunan KCJB itu masuk belanja APBN.

“Kami di Banggar dan saya tanya langsung ke Wakil Ketua komisi VI itu tidak ada kereta cepat. Ketika itu dibahas di Komisi VI, tidak dibahas di Banggar, tapi *nyelip* di cadangan PEN dan SAL. Apa itu kewenangan Menkeu atau harus ada pelaporan?” cecar Fauzi dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan, kemarin.

Proyek kereta cepat itu telah masuk ke Program Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres 109/2020.

Fauzi bilang pemerintah harusnya menjelaskan perubahan skema tersebut kepada DPR. Apalagi dalam pembiayaan investasi kali ini pemerintah turut menyertakan dana cadangan program pemulihian ekonomi nasional (PEN) dan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai dana PMN.

Di mendorong pemerintah terburka dan mau menjelaskan pengubahan skema pembangunan KCJB tersebut. Pasalnya, DPR hanya mengetahui informasi PMN yang ada di dalam UU APBN 2021.

Senada, anggota Komisi XI lainnya Kamarussamad menuturkan skema baru yang dipakai dalam pembangunan KCJB berada di luar perencanaan APBN dan tanpa persetujuan DPR.

“Itu perlu penjelasan secara moral, secara politik, kepada kami di DPR, apa dasar mengubah skema tersebut sehingga kita punya juga bahan untuk bisa menjelaskan kepada publik mengenai perubahan tersebut,” kata dia.

Gunakan dana SAL

Dalam raker itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemberian PMN kepada PT KAI dalam pembangunan KCJB dilakukan karena perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban ekuitas awal.

“Situasi covid-19, jumlah penumpang merosot tajam. Kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka sehingga pemerintah memasukkan Rp4,3 triliun di dalam PT KAI untuk memenuhi *base equity* penyelesaian kereta cepat Jakarta Bandung,” jelasnya.

Sri Mulyani menyebutkan PMN sebesar Rp4,3 triliun yang diberikan untuk proyek KCJB itu sebagai upaya agar

proyek tersebut tetap bisa berjalan. Berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), empat perusahaan BUMN yang ada di dalam konsorsium proyek tersebut tidak mampu menyertorkan ekuitas awal.

“Dari audit itu, seharusnya (mereka) menyediakan modal awal sebesar US\$920 juta untuk memulai proyek tersebut. Dalam kenyataannya, empat BUMN itu tidak mampu menyertorkan modal awal,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, skema pendanaan proyek KCJB melalui APBN juga telah memiliki landasan hukum yang ada. Proyek kereta cepat itu telah masuk ke Program Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres 109/2020.

Dana PMN yang diberikan itu berasal dari SAL tahun anggaran 2020 sebesar Rp20,1 triliun. Dana SAL itu salah satunya diberikan kepada PT KAI sebesar Rp6,9 triliun dengan rincian untuk kebutuhan *cost overrun* LRT Jabodetabek sebesar Rp2,6 triliun dan pemenuhan ekuitas awal KCJB Rp4,3 triliun. (E-1)